



ORTI BALI

WARTA SEPUTAR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jeg, Sampun Terbit ..

Om Swastyastu,

Setelah melalui persiapan yang panjang, akhirnya Bulletin Triwulanan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali edisi perdana terbit. Bulletin ini kami namakan ORTI BALI yang berarti warta Bali. Kata Orti mungkin akan terasa aneh bagi orang non-Bali, karena ini adalah kata halus dari warta, gatra untuk menyatakan kabar. Nama Orti Bali diambil untuk menegaskan bahwa Bulletin ini diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Bali.

Kami menyadari dalam edisi perdana ini masih terdapat banyak kekurangan, kritikan, masukan, saran dan apapun bentuknya yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari rekan-rekan pegawai Perwakilan Bali. Dan tentunya sumber tulisan dari Redaksi sangat terbatas, akan sangat membantu perkembangan Bulletin ini jika Rekan-rekan berkenan membantu kami dengan menyumbang artikel.

Artikel dapat di kirimkan ke Sub Bagian Hukum Humas Perwakilan Bali, dalam bentuk softcopy. Artikel dapat berupa hal yang terkait tugas pemeriksaan, tips-tips, humor, tau-siah/nasehat dan lain sebagainya.

Kami tunggu partisipasinya ...

Shanti-Shanti-Shanti .. Om

SPESIAL EDISI PERDANA

Spesial di edisi perdana:

- Penyusunan SOP Sekretariat
- Penyerahan LHP
- MOU Penyerahan LHP BPK
- Parama Shanti
- Bedah Buku
- Diklat ACL
- Sosialisasi Juklak PDTT

GATRA BPK

Selama akhir bulan Juni dan awal bulan Juli 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 pada 10 entitas Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali yaitu di Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan penyerahannya dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, serta Kabupaten, Karangasem, Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli dan Kabupaten Gianyar di laksanakan pada sidang Paripurna istimewa dimasing-masing DPRD sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani antara BPK RI Perwakilan Prov. Bali dengan masing-masing Ketua DPRD

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memberikan pendapat (opini) tidak menyatakan pendapat (Disclaimer) atas LKPD TA.2008 tiga entitas yaitu pada Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana sedangkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada enam entitas yaitu pada LKPD Kabupaten Tabanan, Bangli, Klungkung,

PENYERAHAN LHP



Penyerahan LHP BPK RI Provinsi Bali Kepada DPRD Badung

Gianyar, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar.

Dalam Sambutan Kepala Perwakilan Provinsi Bali Bapak I Gede Kastawa, SE., M.M. mengatakan bahwa Laporan Keuangan Daerah belum mengalami kemajuan bahkan terdapat tiga entitas mengalami kemunduran yaitu Disclaimer dan yang mendapat WDP ditahun mendatang diharapkan naik kelas (opiniya menjadi lebih baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian).

Kalan juga menyarankan agar dalam pengelolaan aset lebih diintensipkan pengelolanya di seluruh Provinsi, Kabupaten kota di Bali dengan cara membuat Action Plan untuk memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang dirancang oleh masing-masing pemerintah daerah di Bali

Serta kalan juga menyarankan agar temuan BPK RI ini berdasarkan pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 mewajibkan auditi untuk segera menindak lanjuti rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK demikian juga dengan DPRD agar sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fungsi pengawasan Fungsi budget dan fungsi legeslasi kepada pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara/Daerah serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan Transparan.

GATRA BPK



Dalam rangka meningkatkan

PENYUSUNAN SOP SEKRETARIAT

kualitas dan efektivitas operasional, Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali memandang perlu untuk menyusun suatu panduan standar untuk pelaksanaan kegiatan rutinnya. Terkait hal tersebut pada tanggal 26-28 Juni 2009, bertempat di Guess House LIPI Kebun Raya Bedugul, dilaksanakan

Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali.

Pembahasan Penyusunan SOP Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Bali tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali, I Gede Kastawa, SE., M.M.

GATRA BPK

MOU PENYERAHAN LHP BPK RI



Pembahasan dan Penandatanganan MOU Penyerahan LHP BPK RI Provinsi Bali

Kepala Perwakilan Provinsi Bali beserta pejabat perwakilan yang lain melakukan Pembahasan Kesepakatan Bersama tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali pada hari Jumat, 19 Juni 2009, Pembahasan Kesepakatan Bersama yang dihadiri oleh Ketua/wakil ketua atau salah satu wakil dari dewan di daerahnya masing-masing di Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Poin-poin yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Anggota BPK RI atau Kepala Perwakilan Provinsi Bali atau yang mewakilinya, yang dilakukan dengan cara formal dalam suatu Rapat Paripurna Istimewa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD,

serta Pejabat lain yang dianggap perlu

- Apabila rapat sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan maka penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan di Kantor Perwakilan Provinsi Bali yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota dan pejabat yang dianggap perlu
- Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan satu persatu dengan cara diserahkan kepada pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat di Kantor Perwakilan Provinsi Bali di kantor atau DPRD
- Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan hasil pemantauan tindak lanjut dilakukan dengan cara diserahkan melalui Pimpinan DPRD atau yang mendapat mandat di Kantor Perwakilan.

SOSIALISASI JUKNIS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pada tanggal 21-23 Juli 2009 bertempat di Ruang Belajar Perwakilan Provinsi Bali dilaksanakan sosialisasi Juknis Pemeriksaan PDDT, dalam hal ini adalah pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan investigasi. Sosialisasi dibuka oleh Kepala perwakilan Provinsi Bali, I Gede Kastawa, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2009.

Secara umum, landasan dilaksanakannya pemeriksaan lingkungan adalah kepedulian BPK RI (call of duty) dalam rangka turut menjaga kelestarian bumi Indonesia. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai BPK RI di Perwakilan perwakilan untuk memahami pentingnya dilaksanakan pemeriksaan lingkungan, sehingga tanggung jawab pemeriksaan tentang permasalahan lingkungan tidak hanya menjadi urusan AKN IV selaku auditama yang membawahi masalah lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemeriksaan lingkungan tidak harus selalu berdasarkan pada pemeriksaan tematik tentang lingkungan, tetapi juga bias ditempelkan pada pemeriksaan laporan keuangan daerah (LKPD). Tujuan lain dari sosialisasi juknis pemeriksaan PDDT (dhi. Pemeriksaan Lingkungan) adalah mencari masukan untuk penyempurnaan juknis, karena banyak sekali permasalahan lingkungan yang berbeda yang belum tentu dapat diakomodir dalam juknis.

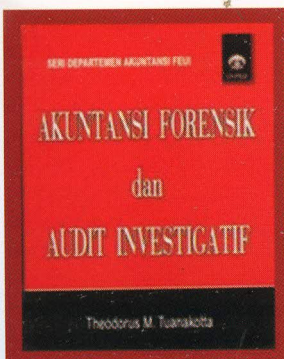
Di sesi terakhir hari Rabu tanggal 23 Juli 2009, materi sosialisasi adalah juknis terkait pemeriksaan investigasi. Sosialisasi juknis tersebut dibawa oleh Iman Santoso, Kepala Seksi di Perwakilan DKI Jakarta. Dalam pemaparan, beliau menjelaskan tentang proses pelaksanaan pemeriksaan investigasi, mulai dari dasar pelaksanaan pemeriksaan, kewenangan pelaksanaan investigasi, tata cara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan sampai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Selain kedua hal diatas, juga disinggung mengenai perbedaan antara substansi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Di Perwakilan Provinsi Bali

BEDAH BUKU

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF



Buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif karangan Theodorus M. Tuanakota berusaha menjawab berbagai pertanyaan seputar fraud, pencegahan, pendeteksian, sampai dengan pengungkapan fraud melalui audit investigatif dan akuntansi forensik yang merupakan inti dari buku ini.

Buku dibagi dalam lima bagian dan terdiri dari tiga puluh bab. Theodorus menjelaskan istilah akuntansi forensik lebih tepat digunakan jika sudah bersinggungan dengan bidang hukum. Sementara hasil audit investigatif dapat, tetapi tidak harus, digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk penyelesaian hu-

kum lainnya.

Dalam penerapannya akuntansi forensik memang banyak bersinggungan dengan hukum. Pengungkapan kasus Bank Bali adalah contoh keberhasilan akuntansi forensik. Auditor PwC berhasil menunjukkan aliran dana yang bersumber dari pencairan dana penjaminan Bank Bali.

Seorang auditor fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang auditor fraud yang sukses mempunyai kemampuan

mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah, dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Auditor fraud adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan investigator.

Secara umum buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif karangan Theodorus M. Tuanakota ini layak untuk dibaca terutama oleh mereka yang berkecimpung di bidang audit investigatif dan banyak menangani kasus korupsi.

dengan bidang hukum. Sementara hasil audit investigatif dapat, tetapi tidak harus, digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk penyelesaian hu-

EKSEBISI

BPK VS INSPEKTORAT

Dalam rangka mempererat hubungan kerja anatar BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan Inspektorat Provinsi Bali mengadakan pertandingan eksebis tenis lapangan. Dalam pertandingan eksebis tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bali bertindak selaku tuan rumah.

Pertandingan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di arena tenis lapangan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Tim BPK yang dikomandoi oleh Kasubaud Bali II, Nelson Ambarita, mengawali pertandingan dengan formasi pertama Pak Nelson dengan Pak Wisnu. Hasilnya, ternyata lumayan bagus, tim BPK dihajar 8-4 oleh tim Inspektorat. Tak ingin membuat malu dihadapan public sendiri, tim BPK memasukkan tim baru, Pak Joseph dengan Pak Putu Gin, hasilnya tidak jauh berbeda dengan tim sebelumnya, tim BPK babak belur dihajar 8-2.

Mengejar ketertinggalan dimasukkan pemain muda berbakat, Sutardi dan Suchan. Dan memang, tim BPK lagi-lagi harus mengakui keunggulan Tim Inspektorat, takluk dengan skor 8-3. Saat dikonfirmasi mengenai kekalahan tim, Pak Nelson menjawab "ah.. Itu kan pemain dari luar semua, jadi mereka menang".



INTOSAI

KOORDINASI PANITIA



Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Work Group of Environmental Auditing (WGEA) Intosai di Ubud, Gianyar pada tanggal 4-6 Agustus 2009, di Ruang belajar Perwakilan BPK RI

Provinsi Bali digelar koordinasi akhir persiapan pelaksanaan acara tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut Panitia dari BPK RI Jakarta dan Panitia dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali serta dengan tim dari Penjor Travel selaku penyedia jasa transportasi dalam acara WGEA Intosai tersebut. Pada pertemuan tersebut dimatangkan koordinasi dalam penjemputan delegasi dari 16 Negara anggota Intosai serta mekanisme pengantaran delegasi saat pulang dari lokasi konferensi. Selain itu dibahas tugas dari panitia lokal serta pengamanan dalam pelaksanaan konferensi serta antipati tamu yang datang terkait dengan merebaknya virus A H1N1 dengan thermo scanner dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

GATRA BPK

DIKLAT AUDIT COMMON LANGUAGE (ACL)

Semakin berkembangnya sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah (SIMDa), yang menggunakan basis data base, membuat pemeriksa juga harus memahami struktur data dan langkah pemeriksaan yang efektif dan cepat untuk memeriksa sistem pelaporan tersebut. Atas dasar hal tersebut, Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan diklat *Audit Common Language (ACL)*. Bertempat di Ruang Belajar kantor Perwakilan Provinsi Bali, Diklat tersebut dibuka oleh kepala Perwakilan provinsi Bali, I Gede Kastawa, pada tanggal 27 Juli 2009.

Diklat ACL tersebut dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009. Instruktur dalam diklat ini adalah Pinky Dezar Zulkarnain, dari Biro TI Pusat. Materi yang diajarkan dalam diklat ini pada hari pertama adalah pengertian dasar dari Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), serta pengenalan dasar terkait dengan data base dan audit IT, selain itu diulas juga mengenai perbedaan

audit antara audit TI dengan audit berbantuan komputer.

Diklat ACL ini diikuti sebanyak 35 peserta yang terdiri dari para pemeriksa di unit kerja Sub Auditorat Bali I dan II. Sedangkan pada hari kedua, peserta diklat langsung diajarkan penggunaan ACL. Mulai dari pengenalan fitur-fitur yang ada sampai dengan simulasi kasus permasalahan. Pada hari ketiga, diajarkan penggunaan ACL untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam bentuk file data base. Sehingga dengan praktik simulasi tersebut diharapkan peserta mampu menerapkan apa yang telah dipelajari untuk melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Dalam websitenya disebutkan, ACL dapat digunakan pula untuk Continuous Auditing. Continuous Auditing adalah metode yang digunakan oleh auditor untuk melakukan audit yang terkait

dengan kegiatan yang terus menerus. Continuous Auditing merupakan perubahan paradigma dari audit berkala dengan tinjauan dari sampel untuk transaksi yang sedang berlangsung dengan audit prosedur tes 100 persen dari transaksi sehingga lebih tepat waktu dan komprehensif.

Karena kompleksitas dari transaksi, pengujian secara tradisional dimana pengujian dilakukan setelah kegiatan usaha terjadi, tidak lagi memadai. Hal tersebut menuntut sebuah proses audit yang secara otomatis melakukan kontrol dan penilaian risiko yang lebih mendasar.

ACL Continuous Auditing Solutions allow organizations to:

- automate regular testing so audit can focus on higher risk areas
- determine the effectiveness of key controls by analyzing finan-



cial transactions continuously and independently

- quickly discover and report fraud, errors, and inefficiencies
- reduce audit time and effort spent on controls testing

Bli Orti

"Do what you write, Write What You Do"

"You will never Know till you have Tried"

Bli Orti

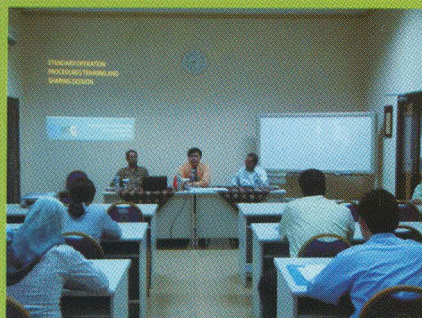


Foto-Foto kegiatan BPK RI Perwakilan Bali
 Foto Atas : Diklat Penyusunan SOP
 Foto Tengah : Konsultasi dengan DPRD
 Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana dan
 Kabupaten Badung
 Foto Bawah : Penyerahan LHP LKPD BPK
 RI kepada DPRD Kabupaten Bangli dan
 Gianyar



PARAMA SHANTI

BERCERMIN DARI KARNA



Redaksi ORTI BALI

Penanggung Jawab : Kepala Perwakilan
 BPK RI Provinsi Bali

Redaktur : I Putu Wisudhantara
 Sekretaris : Tatiek Sumartini
 Editor : I.B. Ketut Wisnu
 I.B. Ketut Sidhastu

Redaktur : IGA Masningrat
 Pelaksana : Ayu Suartini
 Fitrië Taurusia
 Bevy Kartikasari

Fotografer : Febrianson Ondos
 Desain : Nasruchan
 Putu Eka Kumara

Kritik dan saran :
fongsuchan@gmail.com

BERCERMIN DARI SIKAP KARNA

Kisah Karna berhubungan dengan nilai-nilai kesetiaan yang terdapat dalam ajaran Panca Satya. Kelima nilai kesetiaan itu adalah:

- Pertama, satya wacana artinya setia atau jujur dalam berkata-kata dan tidak ber dusta.
- Kedua, satya hredaya, artinya setia akan kata hati, berpendirian teguh dan tidak mudah terombang-ambing.
- Ketiga, satya laksana, artinya setia dan jujur mengakui dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diperbuat.
- Keempat, satya mitra, artinya setia kepada teman atau sahabat.

- Kelima, satya semaya, artinya setia kepada sumpah ataupun janji.

Pelajaran penting dari kisah Karna adalah bahwa idealisme Karna perlu ditiru oleh masyarakat. Karna tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Para calon pemimpin, hendaknya mempunyai sifat seperti Karna yang Setia pada janji-janjinya, setia pada sahabat-sahabatnya, berpendirian teguh, serta jujur dan bertanggung jawab. Jangan hanya mengobrol janji palsu yang tidak menghantarkan hasil bagi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah kenegaraan yang krusial. Rgveda X.91. 2 menyebutkan : "janan janam janyo ndti

manyate visa a kseti visyo visatam". Artinya, pemimpin bagaikan api, pemimpin adalah seorang tokoh yang mencintai sesama manusia dan tidak membenci siapapun. Setiap pemimpin terpilih harus mampu menempatkan diri secara tepat dan mampu memandang jelas serta membedakan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Karena kepemimpinan tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi kekuasaan. Sedangkan kekuasaan berpeluang besar menimbulkan penindasan. Oleh sebab itu, Kitab Ramayana Jawa Kuno Bab I Sloka 9 menyatakan, "parartha gunawe sukhanin bhuwana". Artinya, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum dan berbuat untuk kebahagiaan rakyat banyak.

Sumber: www.parisada.org